

PENGARUH RASIO KEMANDIRIAN DAERAH, EFEKTIFITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN PENGELOLAAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH

Nur Shafira Anynda
firaanynda@ymail.com
Suwardi Bambang Hermanto

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of local independence ratio, effectiveness of Local-owned Source Revenue and local expenditure management on local finance performance. While, the population was 29 districts and 9 cities in East Java which completely published and reported Budget Realization Report that listed on Financial and Asset Management Board of East Java for 5 years during 2014-2018. The research was quantitative research. Moreover, the data collection technique used purposive sampling. In line with, there were 190 data as sample. Furthermore, the data analysis technique used multiple linear regression with Statistical Product and Service Solution (SPSS) 23. And the research result concluded: (a) Local Independence ratio had positive effect on local finance performance of districts and cities in East Java, (b) Effectiveness of Local-owned Source Revenue had positive effect on local finance performance of districts and cities in East Java and (c) Local Expenditure Management had positive effect on local finance performance of districts and cities in East Java.

Keywords: local independence, effectiveness revenue, expenditure management, finance performance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh rasio kemandirian daerah, efektifitas pendapatan asli daerah dan pengelolaan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah 29 Kabupaten dan 9 Kota di Propinsi Jawa Timur. Sampel yang diambil adalah Kabupaten dan Kota yang menerbitkan serta melaporkan secara lengkap Laporan Realisasi Anggaran yang terdapat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Propinsi Jawa Timur selama 5 tahun mulai periode 2014-2018. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Jumlah sampel pada penelitian ini sebesar 190 data melalui metode *purposive sampling* dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda dengan program *Stastical Product and Service Solution* (SPSS) 23. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (a) Rasio Kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, (b) Efektifitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, (c) Pengelolaan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

Kata Kunci: kemandirian daerah, efektifitas pendapatan, pengelolaan belanja, kinerja keuangan

PENDAHULUAN

Kinerja Keuangan Daerah merupakan suatu gambaran tentang tingkat pencapaian pelaksanaan pemerintah daerah dalam suatu program atau kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi, sekaligus visi yang telah ditetapkan dalam suatu program dalam periode tertentu (Bastian, 2010). Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah yang berguna untuk mengelola sumber keuangan yang terdapat pada daerah itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung dalam proses berjalannya suatu pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam mengelola keuangan daerah yang baik berpengaruh besar terhadap kondisi suatu daerah dan dapat menjadikan daerah tersebut kuat dan berkuasa dari pada daerah lainnya. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara efektif, efisien, ekonomis serta transparansi dan

akuntabilitas dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang bisa mengurangi jumlah pengangguran dan mengurangi kemiskinan.

Faktor yang paling utama dalam meningkatnya pertumbuhan perekonomian yaitu dengan dilakukannya peningkatan investasi antara lain adalah peningkatan ketersediaan infrastruktur yang layak dan memadai, baik itu kualitas maupun kuantitas. Dalam melaksanakan peningkatan ketersediaan infrastruktur yang layak di daerah, perlu adanya campur tangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang harus bekerjasama untuk dapat terciptanya efektifitas dan efisiensi suatu pemerintah kota/ kabupaten tersebut dan menjamin sumber daya manusia yang ada di daerah. Selain itu, pemerintah daerah dapat juga mengatur strategi pembangunan infrastruktur yang lebih fleksibel, agar dapat menciptakan kedekatan antara pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga berbagai keinginan masyarakat dapat terpenuhi oleh pemerintah daerah. Misalnya, dapat berguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik terpenuhi, dan kemakmuran di masyarakat. Hal itu dilaksanakan agar tidak adanya masalah yang menimbulkan suatu polemik yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota/ kabupaten dan masyarakat tersebut.

Kinerja pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan, mengingat bahwa pemerintah daerah berhak, berkewajiban, dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat (UU No. 23 Tahun 2014). Kinerja pemerintah daerah harus dapat bekerjasama dengan pemerintah pusat, karena pemerintah daerah mengatur seluruh jalannya program-program dalam meningkatkan suatu keuangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh pemerintah pusat. Untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan adalah menganalisis dan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan membandingkan pencapaian yang telah dibuat oleh pemerintah daerah dari tahun sebelumnya dengan tahun periode saat ini sehingga dapat diketahui apakah tujuan pemerintah tercapai dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah tersebut. Dalam menciptakan kemandirian di setiap daerah, pemerintah harus dapat berupaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk masyarakat dan memperbaiki berbagai sektor yang dapat mengembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut diantara lain adalah pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Terutama dengan pengenaan pajak, pajak itu sendiri adalah sumber utama dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Dalam meningkatkan kemandirian setiap daerah, pemerintah juga harus dapat memaksimalkan pendapatan yang dimiliki.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang sah dikelola daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi peran yang ada dalam pendapatan asli daerah didalam pendapatan daerah maka merupakan cermin keberhasilan usaha dan tingkat kemampuan dalam hal membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah tersebut. Suatu daerah tidak akan mungkin berhasil jika daerah tersebut tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti, meskipun pendapatan asli daerah mengalami peningkatan. Hal itu dikarenakan pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tujuan yang penting bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pembangunan sarana dan prasarana memiliki dampak yang sangat berguna terhadap kenaikan pajak daerah. Dengan maksimalnya fasilitas publik yang tersedia maka hal tersebut berpengaruh pada meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Mardiasmo, 2002 dalam Arwati dan Hadiati 2013).

Pengalokasian belanja daerah sebaiknya berdasarkan dengan kebutuhan masing-masing suatu daerah yang banyak membutuhkan anggaran belanja tersebut. Menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan

atas penyediaan sarana dan prasarana adalah luas wilayah. Daerah dengan wilayah yang lebih luas tentulah membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas, maka agar tidak terjadi ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan lainnya, oleh karena itu, pemerintah mengalokasikan anggaran dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang berguna untuk membiayai kebutuhan daerah-daerah.

Pada saat ini hal-hal penting yang menjadi pokok utama adalah bagaimana cara membuat sistem yang dimana sumber dana dari pemerintahan untuk daerah yang jumlahnya cukup memenuhi sehingga daerah satu dengan yang lainnya tidak terlalu berbeda anggaran yang diturunkan oleh pemerintah. Hal ini harus dilakukan terutama pada daerah yang kurang sejahtera agar mendapatkan pemerataan kesejahteraan di lingkungan masyarakat.

TINJAUAN TEORETIS

Teori Keagenan

Menurut Jensen dan Meckling, 1976 (dalam Ani dan Dwiranda, 2014) teori keagenan adalah suatu kontrak antara *principal* dengan *agent*, dengan melihat pendelegasian wewenang dalam mengambil keputusan kepada *agent*. *Principal* yaitu pihak yang bertugas untuk membuat suatu kontrak, mengawasi, termasuk pendelegasian otoritas atas kebijakan kepada *agent*. *Agent* sendiri adalah bertugas untuk menerima otoritas dan menjalankan kontrak dari *principal*. Teori keagenan menunjukkan bahwa setiap individu hanya termotivasi oleh kepentingan diri sendiri sehingga menimbulkan masalah kepentingan antara *principal* dan *agent*. Setiap pemerintah daerah bertindak sebagai *agent* untuk melaksanakan kontrak dari *Principal*. *Principal* selaku legislatif wajib untuk mengawasi dan menilai kinerja pemerintah daerah (*agent*), sehingga dapat dilihat sejauh apa kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya dan bertindak dalam mengelola sumber daya supaya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah lebih mengetahui informasi keuangan daripada legislatif (*principal*) karena eksekutif mengetahui langsung kondisi yang terjadi di dalam kinerja keuangan suatu daerahnya. Legislatif mengawasi kinerja keuangan agar segala bentuk kebijakan khususnya dalam hal penggunaan alokasi dana dan realisasi keuangan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk dapat mengutamakan kepentingan publik. Kinerja keuangan daerah adalah rasio keuangan, dimana dengan rasio keuangan tersebut dapat diketahui tolak ukur kinerja dalam segi keuangan kepada masyarakat. Berbagai banyak keinginan masyarakat terhadap pemerintah dalam memberikan hasil kinerja keuangan yang optimal kepada masyarakat dengan melakukan berbagai kegiatan yang berguna untuk memenuhi keinginan masyarakat tersebut. Dalam melakukan penyusunan anggaran adalah salah satu kegiatan yang penting harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah.

Teori keagenan membahas tentang adanya saling keterkaitan antara *agent* dan *principal*. Dengan saling bekerjasama untuk mensejahterakan masyarakat maka pemerintah pusat memberikan wewenang dalam mengelola anggaran kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola alokasi anggaran dengan baik. karena anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga bersumber dari masyarakat. Dengan adanya kemandirian daerah yang tinggi dan pemerintah daerah dapat mengelola belanja daerah dengan benar maka diharapkan kinerja keuangan daerah dapat optimal.

Signaling Theory

Signaling Theory, atau bisa disebut juga teori sinyal yang dikemukakan oleh Spence (1973) didalam penelitian yang berjudul *Job Market Signaling* bahwa teori sinyal merupakan isyarat dari pemilik informasi kepada pihak penerima informasi yang berusaha memberikan potongan informasi relevan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima. Pihak penerima

akan menyesuaikan bagaimana perilaku apakah sesuai dengan pemahaman terhadap sinyal yang telah diberikan. Teori *Signaling* merupakan teori yang menunjukkan bahwa pemerintah memberikan sinyal kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan program-program pelayanan publik dengan baik agar bisa mensejahterakan masyarakat. Tujuannya adalah supaya masyarakat tetap mendukung pemerintah daerah yang sedang berjalan saat ini sehingga suatu pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Teori sinyal menjelaskan jika pemerintah sebagai pihak yang diberikan tugas untuk mempunyai keinginan dalam menunjukkan sinyal kepada masyarakat. Pemerintah akan memberi sinyal dengan cara membuat dan memberi laporan keuangan yang berkualitas, dapat meningkatkan sistem pengendalian internal, dapat mengungkapkan secara lengkap dan transparan.

Signaling theory membahas tentang bagaimana pemerintah sebagai pihak yang diberi amanat oleh masyarakat berkeinginan menunjukkan *signal* yang baik untuk masyarakat. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat dengan memberikan sinyal berupa informasi keuangan yang positif dan dapat dipercaya untuk masyarakat. Didalam laporan keuangan yang berkualitas, peningkatan sistem internal, dan pengungkapan yang lebih lengkap dapat dijadikan sinyal yang baik untuk masyarakat. Dalam teori sinyal adanya dorongan untuk memberikan informasi dikarenakan terdapat asimetri informasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan menyampaikan informasi laporan keuangan daerah agar bertujuan untuk masyarakat terus mendukung kinerja keuangan daerah saat ini, sehingga kegiatan didalam pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah merupakan komponen paling penting untuk mengukur suatu kinerja serta konsep dalam pengelolaan organisasi pemerintah dengan menjamin dalam menjalankan pertanggungjawaban kepada masyarakat oleh lembaga pemerintah. Didalam pengukuran kinerja merupakan komposisi yang penting karena akan memberikan umpan balik atas rencana yang diimplementasikan. Hal tersebut akan bermanfaat untuk menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam membiayai rumah tangganya sendiri atau membiayai kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah tersebut, untuk mengukur efektifitas dalam menganggarkan suatu pendapatan daerah, mengukur tingkat aktifitas pemerintah dalam membelanjakan anggaran pendapatan daerah dengan baik dan benar, mengukur tingkat partisipasi sumber-sumber pendapatan dalam membentuk suatu pendapatan daerah, memantau perkembangan dan pertumbuhan hasil perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah selama periode waktu yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan daerah adalah gambaran pencapaian dalam suatu program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal itu, jika program yang dilaksanakan pemerintah daerah dengan tepat dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan tercapainya suatu kinerja keuangan pemerintah daerah yang berkualitas merupakan keberhasilan yang dapat mensejahterakan masyarakat.

Rasio Kemandirian Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Daerah merupakan gambaran dari tergantungnya daerah terhadap tingkat partisipasi oleh masyarakat dalam bidang pembangunan daerah. Rasio kemandirian juga menunjukkan bagaimana peran masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi juga peran masyarakat dalam membayar retribusi dan pajak daerah yang merupakan komposisi paling penting pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar retribusi dan pajak akan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan di masyarakat juga semakin tinggi.

Untuk mempersiapkan kemandirian daerah tersebut, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah yakni memperkuat struktur perekonomian sehingga pemerintah daerah dapat memiliki sumber-sumber keuangan yang baik. Oleh karena hal itu pemerintah daerah harus dapat mengelola sumber keuangan, agar dapat melakukan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memadai. Semakin tinggi rasio kemandirian maka hal tersebut berarti tingkat dalam ketergantungan pada pemerintah pusat semakin rendah. Begitu pula sebaliknya, jika semakin rendah rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat semakin tinggi. Dengan tidak ketergantungannya kepada pemerintah pusat, maka suatu daerah tersebut bisa dikatakan mandiri.

Efektifitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Efektifitas pendapatan asli daerah merupakan gambaran atas kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah yang telah direncanakan dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan menurut potensi riil daerah (Halim, 2012). Pemerintah daerah harus mengetahui bagaimana mengidentifikasi mengenai sumber pendapatan asli daerah yang potensial. Apabila pemerintah daerah dapat memperhatikan dan mengelola dengan baik, maka pengelolaan tersebut akan efektif, efisien, dan ekonomis. Pentingnya pendapatan asli daerah dapat menyokong pembangunan daerah itu sendiri dan merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan dana akan meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah melalui penyederhanaan prosedur administrasi dalam pemungutan pajak, pembayaran retribusi daerah dan upaya meningkatkan ketaatan wajib pajak serta pembayaran retribusi daerah dan dapat meningkatkan pengendalian, pengawasan atas pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan. Hasil dari efektifitas pendapatan asli daerah bahwa penerimaan pajak dan retribusi daerah yang menjadi komposisi utama dari penerimaan pendapatan asli daerah dapat berjalan dengan lancar.

Pengelolaan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

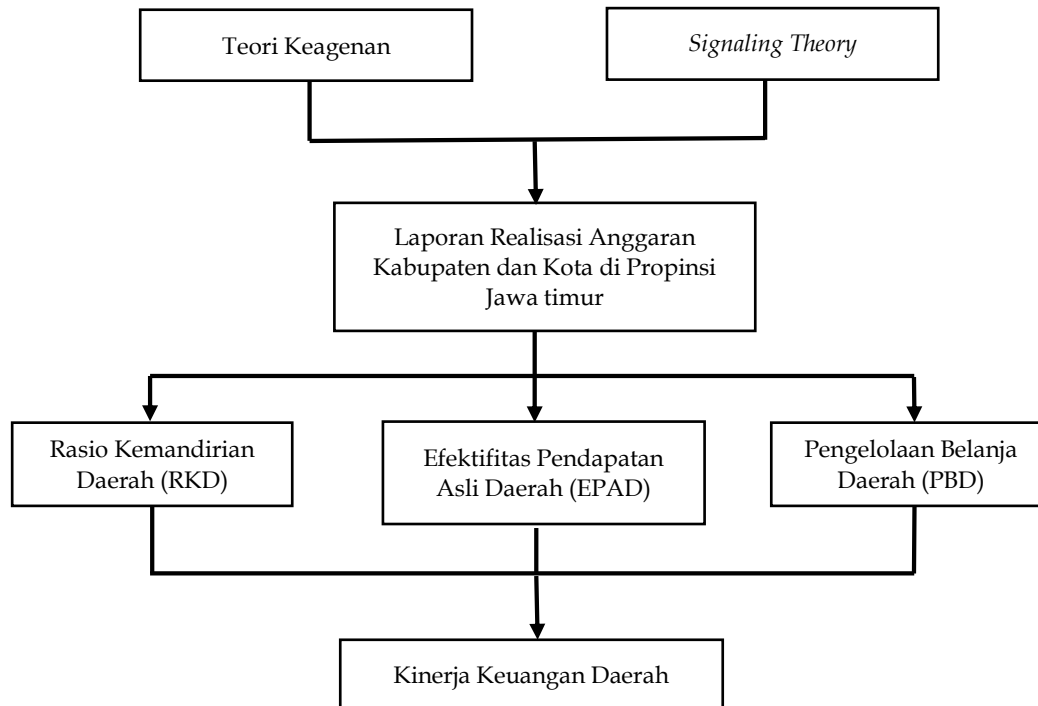
Pengelolaan Belanja Daerah merupakan kegiatan mengelola belanja daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah (Nanik, 2012). Pengelolaan Belanja Daerah yang efisien dan tepat, akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih pada tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran oleh bendahara umum daerah yang bertugas untuk mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang tidak akan diperoleh penggantian oleh pemerintah.

Pengelolaan belanja berguna untuk mengukur sejauh mana pemerintah dapat berhasil mengeluarkan pendapatan yang diperoleh untuk dikeluarkan dalam bentuk belanja, sebagai perbandingan dengan anggaran belanja pemerintah tidak lebih besar dari jumlah penerimaan daerah. Pengelolaan belanja daerah dihitung dengan cara membandingkan total pendapatan daerah dengan total belanja daerah. Pada pengelolaan belanja daerah, pemerintah daerah juga perlu menggunakan dana yang dimiliki setiap daerah secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan penyelenggaraan kegiatan di daerahnya sendiri, salah satunya dengan pengalokasian belanja. Pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan belanja daerah digunakan untuk pengadaan barang investasi atau fasilitas yang bertujuan agar dapat

memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk kepentingan bersama dalam menyejahterakan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

Rerangka Pemikiran

Berdasarkan teori keagenan dan *signaling theory* yang melandasi penelitian ini, maka dapat disusun rerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Sumber: Hasil studi teoretis dan studi empiris yang diolah, 2020

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Penelitian yang dilakukan oleh Adi (2006) tentang mengenai kemandirian daerah menjelaskan jika tingkat kemandirian daerah yang ditunjukkan melalui total pendapatan menggambarkan kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan sendiri, tidak bergantung pada pemerintah pusat. Kemandirian akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang positif dan meningkatkan volume investasi di daerah dan kinerja keuangan daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

Sama halnya dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Groves *et al*, 2001 (dalam Ningsih, 2010) kemandirian daerah tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi tersebut adalah faktor lingkungan, kesejahteraan, dan finansial. Hubungan faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap kemandirian daerah yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, rumusan hipotesis yang pertama dinyatakan sebagai berikut:

H₁: Rasio Kemandirian Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Pengaruh Efektifitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Rohman (2012) mengungkapkan bahwa tingginya penerimaan pendapatan asli daerah dapat meningkatkan kemandirian pemerintah daerah yang berimplikasi pada kinerja keuangan daerah sehingga pendapatan asli daerah

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Sama halnya penelitian yang dilakukan oleh Darwanis dan Saputra (2014) mengemukakan jika pemerintah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pungutan yang bersumber pada pajak dan retribusi sehingga pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah. Oleh sebab itu, pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan daerah.

Menurut penelitian yang telah dilakukan Anzarsari (2014) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara Pendapatan Asli daerah dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin besar efektivitas pendapatan asli daerah maka akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, hipotesis yang kedua dinyatakan sebagai berikut:

H₂: Efektifitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah

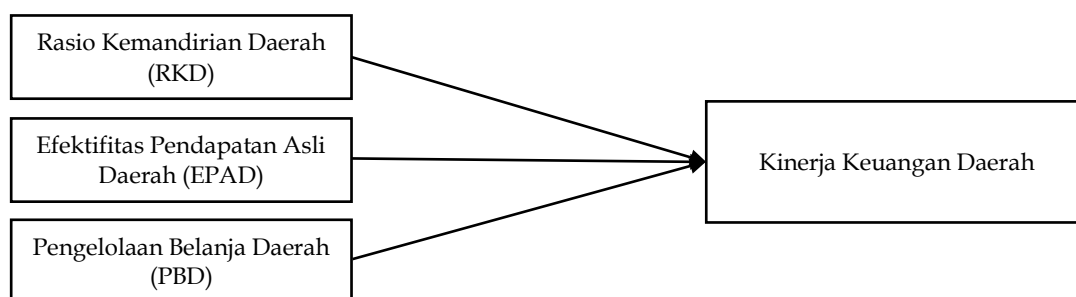
Pengaruh Pengelolaan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Yulia dan Mimba (2016) mengemukakan bahwa pengalokasian dana belanja daerah yang lebih banyak nantinya dapat membantu daerah untuk memperoleh sumber keuangan sehingga berimplikasi pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah, maka hal tersebut berarti pengelolaan belanja berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan daerah.

Pratama *et al* (2015) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Semakin tinggi belanja daerah, pemerintah daerah akan memberikan pelayanan yang lebih baik sekaligus berkualitas dan hal tersebut dapat berpengaruh dengan tingkat kinerja keuangan. Oleh karena itu, pengelolaan belanja daerah terdapat pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H₃: Pengelolaan Belanja daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan perumusan hipotesis diatas, maka dapat dibuat model penelitian sebagai berikut:



Gambar 2
Model Penelitian

Sumber: Hasil studi teoretis dan studi empiris yang diolah, 2020

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Obyek) Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dimana penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.

Populasi merupakan wilayah general yang terdiri dari subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian menyimpulkan hasil penelitian tersebut. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Timur.

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam pengambilan sampel, teknik yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel berdasarkan pada pertimbangan dan kriteria tertentu. Berikut kriteria sampel yang telah ditentukan: (1) Kabupaten dan Kota yang menerbitkan Laporan Realisasi Anggaran selama periode 2014-2018. (2) Kabupaten dan Kota yang melaporkan secara lengkap Realisasi Anggaran selama periode 2014-2018.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter. Data dokumenter merupakan jenis data penelitian yang berupa arsip memuat apa dan kapan suatu transaksi serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian, data ini dikumpulkan dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah yang terdapat pada BPKAD Propinsi Jawa Timur. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder adalah data yang pada umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah terpublikasi. Sumber data yang diperoleh untuk penelitian ini dari meminta data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2014-2018 yang diperoleh dari BPKAD Propinsi Jawa Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah melakukan pengecekan terhadap laporan realisasi anggaran pemerintah daerah tersebut selama periode 2014-2018, selanjutnya peneliti menganalisis laporan realisasi anggaran tersebut yang akan dijadikan untuk menghitung dalam variabel independen dan variabel dependen.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas variabel independen dan variabel dependen. Variabel Independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah Rasio Kemandirian daerah, Efektifitas Pendapatan Asli daerah, dan Pengelolaan Belanja Daerah. Variabel Dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen. Pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah Kinerja keuangan Daerah.

Kinerja Keuangan Daerah

Pengukuran kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah (Hamzah, 2007). Penggunaan rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Hamzah (2007). Semakin tinggi rasio efisiensi maka semakin buruk kinerja, sedangkan semakin rendah rasio efisiensi menunjukkan kinerja yang baik. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dengan rumus:

$$\text{KKD} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan didalam pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Ardhini, 2011). Menurut Halim (2012) Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar atau kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total pendapatan daerah yang bersumber pada pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rumusan rasio kemandirian daerah adalah:

$$\text{RKD} = \frac{\text{PAD } i}{\text{Total Pendapatan Transfer } i} \times 100\%$$

Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mahmudi (2011) Efektifitas Pendapatan menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan. Dikatakan efektif jika rasio efektifitas mencapai 100%. Semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Efektifitas Pendapatan Asli Daerah yaitu analisis efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan (Ardhini, 2011). Rumusan efektifitas pendapatan asli daerah yaitu:

$$\text{EPAD} = \frac{\text{Realisasi PAD } i}{\text{Target Penerimaan PAD } i} \times 100\%$$

Pengelolaan Belanja Daerah

Pengelolaan belanja bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemerintah berhasil mengeluarkan pendapatan yang diperoleh untuk dikeluarkan dalam bentuk belanja. Sebagai perbandingan belanja pemerintah daerah tidak lebih besar dari total pendapatan (Welly dan Djuniar, 2017). Pengelolaan belanja daerah menunjukkan kegiatan belanja pemerintah daerah memiliki ekuitas antara periode yang positif, yaitu belanja dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima. Rumus untuk menghitung pengelolaan belanja daerah yaitu:

$$\text{PBD} = \frac{\text{Total Pendapatan Daerah}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Teknik Analisis Data Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini berguna untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai suatu data yang menunjukkan hasil dari pengukuran rata-rata (*mean*), standar deviasi (*standard deviation*), dan nilai maksimum dan nilai minimum serta jumlah data (Ghozali, 2013). Pengujian ini dilakukan untuk menunjukkan gambaran keseluruhan dari sampel dan untuk memudahkan dalam memahami variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Statistik Inferensial

Spesifikasi Model

Pengujian didalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Dimana analisis regresi linear berganda merupakan studi yang mengenai tentang tergantungnya variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, yang bertujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata suatu variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang telah diketahui. Analisis regresi linear berganda ini dapat dimodelkan dalam persamaan sebagai berikut:

$$KKD = \alpha + \beta_1 RKD + \beta_2 EPAD + \beta_3 PBD + e$$

Dimana:

KKD	: Kinerja Keuangan Daerah
α	: Konstanta
RKD	: Rasio Kemandirian Daerah
EPAD	: Efektifitas Pendapatan Asli Daerah
PBD	: Pengelolaan Belanja Daerah
$\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien Regresi
e	: <i>error</i>

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal. Untuk menguji apakah distribusi normal atau tidak dapat dilihat melalui analisis regresi linear plot (*normal probability plot*). Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan problem autokorelasi (Ghozali, 2013). Untuk menguji apakah data yang diteliti memiliki autokorelasi atau tidak, dapat menggunakan beberapa cara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Uji Durbin Watson. Nilai statistik dari uji Durbin-Watson yang lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 3 maka terindikasi terjadinya autokorelasi.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya hubungan atau korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2013). Pada model regresi yang baik tidak ditemukan adanya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka terdapat problem yang dinamakan multikolinearitas. Cara untuk mengetahui adanya multikolinearitas adalah dengan melihat *tolerance value* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kriteria untuk mengetahui adanya multikolinearitas atau tidak adalah Jika nilai *tolerance* $> 0,1$ dan $VIF < 10$, maka dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians

dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Jika varians berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang berjenis homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2009). Cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara ZPRED pada sumbu Y dan SRESID pada sumbu X. Jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka terindikasi tidak terjadinya heteroskedastisitas

Uji Kelayakan Model

Uji R²

Uji R² atau sering disebut dengan Koefisien Determinasi merupakan suatu nilai yang mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel independen yang digunakan dalam persamaan regresi, dalam menerangkan variasi variabel dependen (Gujarat, 2003 dalam Setyorini 2013). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Uji F

Uji F merupakan hipotesis yang dilakukan untuk menguji apakah model regresi terdapat pengaruh signifikan pada model penelitian yang layak untuk diuji. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$) (Ghozali, 2013). Kriteria dalam menentukan untuk pengambilan keputusan dalam uji F adalah Jika nilai Signifikansi F < 0,05, maka menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan dalam model penelitian.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk mengukur hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah Uji T. Uji statistik T adalah pengujian secara statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen. Jika tingkat probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria dalam pengambilan keputusan terhadap hasil uji T adalah sebagai berikut: (a) Jika nilai signifikan uji T < 0,05 maka rasio kemandirian daerah, efektifitas pendapatan asli daerah dan pengelolaan belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. (b) Jika nilai signifikan uji T > 0,05 maka rasio kemandirian daerah, efektifitas pendapatan asli daerah dan pengelolaan belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran yang terdapat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Propinsi Jawa Timur pada tahun 2014 sampai tahun 2018. Secara administratif Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota, ini menjadikan Propinsi Jawa Timur sebagai Propinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia. Objek penelitian ini adalah pengaruh rasio kemandirian daerah, efektifitas pendapatan asli daerah dan pengelolaan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah mulai tahun 2014 sampai tahun 2018 yang terdapat pada BPKAD. Berikut adalah tabel kriteria pengambilan sampel:

Tabel 1
Kriteria Pengambilan Sampel

No.	Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah
1	Kabupaten dan Kota yang menerbitkan Laporan Realisasi Anggaran selama periode 2014-2018	38	38	38	38	38	190
2	Kabupaten dan Kota yang tidak melaporkan secara lengkap Realisasi Anggaran	-	-	-	-	-	0
3	Kabupaten yang melaporkan secara lengkap Realisasi Anggaran	29	29	29	29	29	145
4	Kota yang melaporkan secara lengkap Realisasi Anggaran	9	9	9	9	9	45
Jumlah Sampel							190

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Timur, 2020

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa terdapat 190 data sampel yang diperoleh dari 29 Kabupaten dan 9 Kota di Propinsi Jawa Timur yang melaporkan secara lengkap pada BPKAD selama periode 2014-2018.

Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat dari Tabel 2 berikut:

Tabel 2
Descriptive Statistics

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Dev
RKD	190	.05	.79	.20	.12
EPAD	190	.63	1.38	1,04	.16
PBD	190	.98	1.36	1.05	.10
KKD	190	.00	1.45	.12	.22
Valid N (listwise)	190				

Sumber: Data BPKAD Propinsi Jawa Timur diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui hasil analisis statistik deskriptif pada rasio kemandirian daerah menunjukkan jika nilai minimum adalah 0,05 dan nilai maksimum 0,79 dengan nilai mean sebesar 0,20 dan standar deviasi sebesar 0,12. Nilai minimum terjadi pada Kabupaten Ngawi di tahun 2018, dalam hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Ngawi memiliki tingkat peran pemerintah pusat lebih dominan daripada Kabupaten atau Kota yang lain. Namun, nilai maksimum terjadi pada Kabupaten Sidoarjo di tahun 2014 yang menunjukkan jika Kabupaten Sidoarjo tingkat kemandirian telah optimal dan tidak ada lagi campur tangan pemerintah pusat dibanding dengan Kabupaten atau Kota lainnya.

Hasil analisis statistik deskriptif pada efektifitas pendapatan asli daerah menunjukkan nilai minimum sebesar 0,63 dan nilai maksimum 1,38 dengan nilai *mean* sebesar 1,04 dan nilai standar deviasi sebesar 0,16. Nilai minimum terjadi pada Kabupaten Bondowoso di tahun 2017, hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bondowoso memiliki tingkat efektif yang rendah dalam pengelolaan pendapatan asli daerah dibanding dengan Kabupaten atau Kota yang lainnya. Namun, nilai maksimum terjadi pada Kabupaten Pamekasan di tahun 2014 yang menunjukkan bahwa tingkat efektif yang paling tinggi dibanding Kabupaten atau Kota yang lain dalam pengelolaan pendapatan asli daerah.

Hasil statistik deskriptif selanjutnya pada pengelolaan belanja daerah menunjukkan nilai minimum sebesar 0,98 dan nilai maksimum 1,36 dengan mean sebesar 1,05 dan standar

deviasi sebesar 0,10. Nilai minimum terjadi pada Kota Mojokerto di tahun 2015, hal ini menunjukkan bahwa Kota Mojokerto memiliki pengelolaan belanja daerah paling rendah dibanding Kabupaten atau Kota lainnya. Namun, nilai maksimum terjadi pada Kabupaten Jember pada tahun 2017 yang menunjukkan jika tingkat dalam pengelolaan belanja daerah lebih tinggi dibanding dengan Kabupaten atau Kota lainnya dan dapat mengelola belanja daerah dengan optimal.

Hasil dari analisis statistik deskriptif pada kinerja keuangan daerah menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum 1,45 dengan nilai *mean* sebesar 0,12 dan standar deviasi sebesar 0,22. Nilai minimum terjadi pada Kabupaten Bondowoso di tahun 2014, hal itu menunjukkan jika Kabupaten Bondowoso tersebut memiliki nilai kinerja keuangan yang rendah dibanding dengan Kabupaten atau Kota yang lainnya. Namun nilai maksimum terdapat pada Kota Batu di tahun 2016 yang menunjukkan jika Kota Batu memiliki nilai yang paling tinggi dalam kinerja keuangan dibanding dengan Kabupaten atau Kota lainnya.

**Statistik Inferensial
Spesifikasi Model**

Dalam penelitian ini spesifikasi model berguna untuk menguji apakah variabel independen yang terdiri dari rasio kemandirian daerah, efektifitas pendapatan asli daerah dan pengelolaan belanja daerah berpengaruh terhadap variabel dependennya, yaitu kinerja keuangan daerah. Pengujian didalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Dari hasil pengolahan analisis regresi linear berganda pada penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Perhitungan Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std Error	B		
(Constant)	2.83	.36		7.73	.00
RKD	2.25	.52	.16	3.40	.01
EPAD	3.14	.21	.34	3.22	.00
PBD	1.75	.31	.15	3.40	.02

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah
Sumber: Data BPKAD Propinsi Jawa Timur diolah, 2020

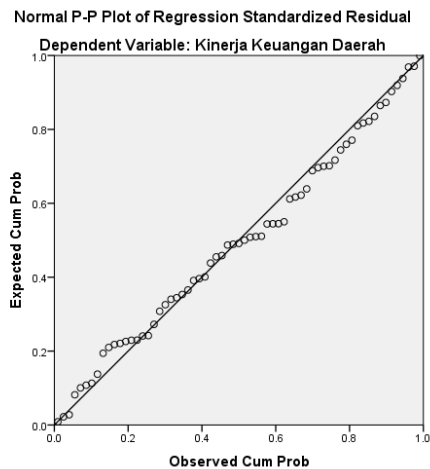
Dari hasil tabel persamaan analisis regresi linear berganda, dapat dilihat bahwa model analisis adalah sebagai berikut:

$$KKD = 2,83 + 2,25 \text{ RKD} + 3,14 \text{ EPAD} + 1,75 \text{ PBD} + e$$

Persamaan diatas dapat di interpretasikan bahwa nilai konstanta sebesar 2,83, karena konstanta yang positif menunjukkan bahwa semua variabel independen dianggap konstan, maka kinerja keuangan daerah akan mengalami peningkatan sebesar 2,83. Nilai koefisien regresi variabel Rasio Kemandirian Daerah sebesar 2,25, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah sebesar 3,14, dan Pengelolaan Belanja daerah sebesar 1,75 dimana koefisien bertanda positif, menunjukkan bahwa adanya hubungan yang searah antara variabel Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli daerah dan Pengelolaan Belanja daerah dengan variabel Kinerja Keuangan Daerah.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Gambar 3

Hasil uji Normalitas

Sumber: Data BPKAD Propinsi Jawa Timur diolah, 2020

Hasil pengujian normalitas yang ditunjukkan pada grafik *Probability plot* dapat dikatakan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan jika data yang digunakan pada penelitian ini telah terdistribusi normal

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		190
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.000
	Std. Deviation	.864
Most Extreme Differences	Absolute	.080
	Positive	.080
	Negative	-.066
Kolmogorov-Smirnov Z		.080
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data BPKAD Propinsi Jawa Timur diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4 diatas, nilai *kolmogorov smirnov Z* sebesar 0,080 dengan tingkat signifikan 0,200, maka hal itu menunjukkan jika variabel penelitian berdistribusi normal karena tingkat signifikasinya $0,200 > 0,005$ sehingga rasio kemandirian daerah, efektifitas pendapatan asli daerah, pengelolaan belanja daerah dan kinerja keuangan daerah berdistribusi normal.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan uji untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan dalam asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lainnya yang terdapat pada model regresi. Metode

pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Durbin-Watson (uji DW). yang ditunjukkan pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.754 ^a	.796	.793	.871	1,791

a. Predictors: (Constant), RKD, EPAD, PBD

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah

Sumber: Data BPKAD Propinsi Jawa Timur diolah, 2020

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,791. Maka nilai Durbin-Watson diketahui angka yang diantara -2 sampai 2 (-2 < 1,791 < 2) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokolerasi dalam model regresi ini.

Uji Multikolinearitas

Tabel 6
Hasil Uji Multikolineritas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	RKD	.969	1.032
	EPAD	.968	1.033
	PBD	.977	1.024

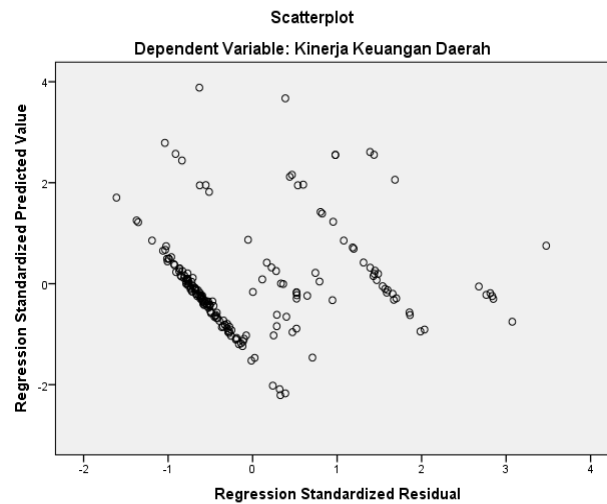
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah

Sumber: Data BPKAD Propinsi Jawa Timur diolah, 2020

Tabel 6 menunjukkan jika nilai *tolerance* ketiga variabel yaitu RKD sebesar 0,969, variabel EPAD sebesar 0,968 dan variabel PBD sebesar 0,977. Sedangkan nilai *Varians Inflation Factor* (VIF) ketiga variabel yaitu variabel RKD sebesar 1,032, variabel EPAD sebesar 1,033 dan variabel PBD sebesar 1,024. Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa angka *tolerance* diatas 0,1 dan nilai *Varians Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10, maka antar variabel independen dan model regresi tidak terjadi multikolinearitas

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah metode yang berguna untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan antar varians variabel dalam model regresi atau tidak. Jika terdapat kesamaan antar varians variabel dalam model regresi, maka dapat dikatakan sebagai homoskedastisitas. Untuk menguji apakah ada atau tidak heteroskedastisitas di dalam variabel penelitian ini dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*, yaitu titik-titik yang menyebar secara acak, yang terdapat diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:



Gambar 4
Grafik Scatterplot

Sumber: Data BPKAD Propinsi Jawa Timur diolah, 2020

Didalam grafik *scatterplot* dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak baik diatas ataupun dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu, maka dapat dikatakan jika data didalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Kelayakan Model

Uji R²

Pada penelitian terdapat analisis pada nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan pada hasil analisis regresi linier berganda pada Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7
Uji R²
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.754 ^a	.796	.793	.871

a. Predictors: (Constant), RKD, EPAD, PBD

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah

Sumber: Data BPKAD Propinsi Jawa Timur diolah, 2020

Dari hasil Tabel 7 menunjukkan jika nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,793 yang berarti bahwa variabel independen yang terdiri dari rasio kemandirian daerah, efektifitas pendapatan asli daerah, dan pengelolaan belanja daerah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah sebesar 79,3%. Sedangkan sisanya 100% - 79,3% = 20,7%. Hal ini menunjukkan masih jika variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah.

Uji F

Uji F adalah uji kelayakan model yang berguna untuk menguji apakah model regresi terdapat pengaruh signifikan pada model penelitian yang layak untuk diuji. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tabel ANNOVA dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$). Jika nilai Sig F < 0,05, maka menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan dalam model penelitian ini. Hasil uji F yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig
1	Regression	36.692	3	12.231	16.098	.000 ^b
	Residual	141.319	186	.760		
	Total	178.011	189			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah

b. Predictors: (Constant), RKD, EPAD, PBD

Sumber: Data BPKAD Propinsi Jawa Timur diolah, 2020

Dari Tabel 8, hasil pengolahan data tersebut diatas dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 16,098 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Dalam hal ini jika model regresi pada penelitian ini layak untuk digunakan karena memiliki tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Uji Hipotesis

Uji Hipotesis ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel rasio kemandirian daerah, efektifitas pendapatan asli daerah, pengelolaan belanja daerah berpengaruh terhadap variabel kinerja keuangan daerah. Maka dilakukan pengujian terhadap variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk menguji tingkat signifikansi uji hipotesis ini dilakukan dengan signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$). Kriteria dalam pengambilan keputusan terhadap hasil uji t ini adalah sebagai berikut: (a) Jika nilai signifikansi uji t < 0,05 bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (b) Jika nilai signifikansi uji t > 0,05 bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut hasil dari uji hipotesis tersebut:

Tabel 9
Hasil Perhitungan Uji Hipotesis
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
		B	Std Error	B		
1	(Constant)	2.83	.36		7.73	.00
	RKD	2.25	.52	.16	3.40	.01
	EPAD	3.14	.21	.34	3.22	.00
	PBD	1.75	.31	.15	3.40	.02

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah

Sumber: Data BPKAD Propinsi Jawa Timur diolah, 2020

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 9 diatas menunjukkan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini adalah (1) Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Dari hasil analisis tersebut menunjukkan nilai t sebesar 3,40 dan tingkat signifikansi sebesar 0,01. Yang berarti bahwa rasio kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Dengan demikian, uji t ini mendukung hipotesis yang pertama bahwa rasio kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. (2) Pengaruh Efektifitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Dari hasil analisis tersebut menunjukkan nilai t sebesar 3,22 dan nilai signifikansi sebesar 0,00. Yang berarti bahwa efektifitas pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Dengan demikian, uji t mendukung hipotesis yang kedua bahwa efektifitas pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. (3) Pengaruh Pengelolaan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Dari hasil analisis tersebut menunjukkan nilai t sebesar 3,409 dan nilai signifikansi sebesar 0,02. Yang berarti bahwa pengelolaan belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja

keuangan daerah. Dengan demikian, uji t mendukung hipotesis yang ketiga bahwa pengelolaan belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan penjelasan dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Pada penelitian ini berdasarkan hasil pengujian statistik digunakan untuk variabel rasio kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini dapat ditunjukkan pada Tabel 9 bahwa t hitung sebesar 3,40 dengan nilai signifikan 0,01 lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien 2,25. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis pertama (H_1) pada penelitian ini diterima. Hasil menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, yang artinya tinggi rendahnya tingkat rasio kemandirian daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Rasio kemandirian daerah menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama. Semakin tinggi kesejahteraan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah juga semakin tinggi. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Groves *et al*, 2001 (dalam Ningsih, 2010) bahwa rasio kemandirian daerah pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian oleh Mahmud *et al* (2014) bahwa rasio kemandirian daerah tidak berpengaruh dengan kinerja keuangan daerah.

Pengaruh Efektifitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Pada penelitian ini berdasarkan hasil pengujian statistik digunakan untuk variabel efektifitas pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini dapat ditunjukkan pada Tabel 9 bahwa t hitung sebesar 3,22 dengan nilai signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien 3,14 Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis kedua (H_2) pada penelitian ini diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa efektifitas pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa perolehan pendapatan daerah telah optimal sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah hal tersebut dapat dikatakan bahwa kemampuan pemerintah daerah masih kurang sehingga pemerintah daerah tersebut belum mampu menggali potensi daerah guna memperoleh efektifitas pendapatan asli daerah. Dan efektifitas pendapatan asli daerah serta merta dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah. Efektifitas Pendapatan Asli Daerah merupakan gambaran atas kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah yang telah direncanakan dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan menurut potensi riil daerah. Oleh sebab itu, efektifitas pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanis dan Saputra (2014) bahwa efektifitas pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Sebaliknya, penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kadek dan Darmayanti (2019) menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Pengaruh Pengelolaan Belanja daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Pada penelitian ini berdasarkan hasil pengujian statistik digunakan untuk variabel pengelolaan belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini dapat ditunjukkan pada Tabel 9 bahwa t hitung sebesar 3,409 dengan nilai signifikan 0,02 lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien 1,751. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis

ketiga (H_3) pada penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

Pengelolaan Belanja menunjukkan jika kegiatan belanja yang terjadi di pemerintahan daerah mempunyai perbandingan antara belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak sebesar dari total pendapatan yang masuk di anggaran pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat secara optimal menekan biaya realisasi belanja dan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak lebih besar dari total pendapatannya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yulia dan Mimba (2016) dan penelitian yang dilakukan Pratama *et al* (2015) mengemukakan bahwa pengelolaan belanja daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan, penelitian ini tidak mendukung yang dilakukan oleh Nugroho dan Rohman (2014) bahwa pengelolaan belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan diantaranya: (1) Rasio Kemandirian Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Dalam hal ini adanya pengaruh rasio kemandirian daerah terhadap kinerja keuangan daerah menunjukkan bahwa tingkat suatu kemandirian suatu daerah mempengaruhi kinerja keuangan daerah tersebut. (2) Efektifitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Pengaruh efektifitas pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah menunjukkan bahwa perolehan pendapatan daerah yang optimal dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah. (3) Pengelolaan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Pengaruh pengelolaan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah menunjukkan bahwa semakin pemerintah daerah secara optimal menekan biaya realisasi belanja, maka dapat berimplikasi pada kinerja keuangan daerah

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran adalah sebagai berikut: (1) Diharapkan pada penelitian selanjutnya, dapat menambahkan variabel selain variabel yang telah digunakan oleh peneliti yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan. (2) Didalam penelitian ini hanya menggunakan sampel dengan periode selama 5 tahun. Diharapkan peneliti selanjutnya memperpanjang periode penelitian dan memilih sampel yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P. H. 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi IX*: 1-22
- Ani, N. P, dan Dwiranda. 2014. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan Kabupaten dan Kota. *Jurnal*. Universitas Udayana Bali 6(3): 481-497
- Anzarsari, D. 2014. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota se-Jawa tengah). *Naskah Publikasi*. Universitas Muhammadiyah. Surakarta
- Ardhini. 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Prespektif Teori Keagenan Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. *Skripsi*. Universitas Diponegoro, Semarang
- Arwati, D. dan N. Hadiati. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah

- Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. *Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan*. Semarang
- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Darwanis dan R. Saputra. 2014. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*. 1(2): 183-199
- Ghozali, I. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- _____. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Halim, A. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Salemba Empat. Jakarta
- Hamzah, A. 2007. Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2001-2006). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. 4(2): 211-228
- Kadek, N. N. I. P dan N. P. A. Darmayanti. (2019). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen* 8(5): 2834-2861
- Mahmud, M., G. Kawung, dan W. Rompas. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 14(2): 1-13
- Mahmudi. 2011. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Dua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Nanik, W. 20012. Analisa Rasio untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang. *Skripsi*. UIN Maliki. Malang
- Ningsih, A. T. 2010. Analisis Faktor Keuangan dan Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret
- Nugroho, F. dan A. Rohman. 2012. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening. *Jurnal*. Universitas Diponegoro 1(1): 1-13
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Jakarta.
- Pratama, K. A. D., D. N. S. Werastuti dan E. Sujana., 2015. Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal*. 3(1): 1-12
- Setyorini, D. 2013. Pengaruh Dana Alokasi Umum (PAD), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Pemerintah daerah Kabupaten Klaten Tahun 2002-2010. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Spence, M. 1973. Job Market Signaling. *The Quarterly Journal of Economics* 87(3): 355-374
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta
- _____. Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintahan Daerah*. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta
- Welly. dan L. Djuniar. 2017. Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan APBD Tahun 2009-2015. *Jurnal Ekonomi*: Universitas Muhammadiyah. Palembang. 22(1): 1-21
- Yulia, A. D. N. dan N. P. S. H. Mimba. 2016. Pengaruh Belanja Rutin dan Belanja Modal pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal*: Universitas Udayana (14)3: 1924-1950